PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG

RENCANA KERJA
RENJA
2026

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026

KECAMATAN BARENG

KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2026* ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen Kecamatan Bareng dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tema *"Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis"*.

Renja Kecamatan Bareng Tahun 2026 memuat program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan dokumen ini diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, hingga penetapan rencana kerja dan pendanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, hingga masyarakat yang telah terlibat aktif dalam proses perencanaan ini melalui Forum Renja, Forum Musrenbang maupun koordinasi lintas sektor.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng sepanjang tahun 2026, sekaligus menjadi instrumen pengukuran kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

bimbingan dan kemudahan dalam mengimplementasikan rencana kerja ini demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang profesional, serta kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bareng.

Jombang, 11 Agustus 2025
CAMAT BARENG

USMAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19710806 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 51
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 72
3.1 Telahaan Terhadap perubahan Kebijakan Nasional 72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 73
3.3 Program dan Kegiatan 74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 80
BAB V PENUTUP 22

Lampiran – Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk Tata Cara Perubahan dari kedua rencana tersebut serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kecamatan atau yang dikenal dengan nama lain merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221, disebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, kecamatan memiliki posisi strategis dimana camat sebagai pimpinan tertinggi harus mampu mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, serta memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode satu tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang memiliki arti strategis dalam pelaksanaan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan

sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- Renja juga menjadi acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS, yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bareng.

Dalam rangka menjamin kualitas perencanaan tahunan perangkat daerah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) perlu dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan pendekatan perencanaan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, serta prosedur perubahan terhadap dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), termasuk di dalamnya Rencana Kerja Kecamatan Bareng, wajib dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berjenjang, dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Proses perencanaan ini mengintegrasikan lima pendekatan utama, yaitu

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Bareng Tahun 2026 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2026 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan tema/arah pembangunan daerah tahun 2026 yang harus dapat diwujudkan adalah **"Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis"** serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Keptutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 - 2043;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
19. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

20. Peraturan Bupati Nomor Tahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 000.7/783/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Dokumen ini juga berperan sebagai instrumen pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Jombang selama tahun 2026, yang menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan secara terukur dan akuntabel.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, yang berperan sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Dalam konteks dinamika globalisasi dan meningkatnya tuntutan persaingan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur menjadi faktor krusial. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan RPD yang hendak diwujudkan adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional sebagai fondasi utama bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mendukung Misi tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bareng pada tahun 2024 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Kewilayahan 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor /Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan rata-rata capaian kinerja Kecamatan Bareng pada tahun 2024 sebesar 101,21% mengalami penurunan sebesar 1,21 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 102,42%. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit penurunan efektivitas dalam pencapaian target program dan kegiatan, meskipun nilainya masih berada di atas 100% yang menandakan target secara umum telah terlampaui. Dari sisi penyerapan anggaran, terjadi kenaikan sebesar 0,04 poin dari 89,38% pada tahun 2023 menjadi 89,82% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam realisasi penggunaan anggaran, yang secara teknokratik mencerminkan peningkatan kapasitas eksekusi kegiatan meskipun tidak diiringi dengan kenaikan capaian kinerja secara proporsional. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja, diperlukan strategi yang menyeimbangkan antara optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas capaian, agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat meningkat secara simultan.

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2024 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk

mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja berupa nilai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pada tahun berjalan ditargetkan sebesar 94,75 namun terealisasi sebesar 87,63 atau mencapai 92,49% dari target, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,30%. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor penghambat capaian kinerja tersebut adalah belum tersedianya fasilitas pendukung seperti area bermain anak dan lahan parkir khusus bagi pengunjung layanan PATEN. Kondisi ini mengurangi kenyamanan serta menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok dengan kebutuhan khusus, menjadikan pelayanan belum sepenuhnya inklusif. Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi capaian nilai PATEN serta persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada tahun berjalan ditargetkan 16 Orang/Bulan dan Terealisasi 15 Orang/bulan atau tercapai 93,75% dengan penyerapan anggaran 88,05%. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor penghambat capaian kinerja tersebut terjadi karena terdapat dua jabatan struktural yang masih belum terisi, yaitu Kasi Sosial Budaya yang purna tugas sejak November 2023.
3. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Pada tahun berjalan ditargetkan 22 paket dan terealisasi 20 paket atau kinerja tercapai 90,91% dengan penyerapan anggaran 89,47%. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor penghambat capaian kinerja tersebut terjadi karena terdapat dua jabatan struktural yang masih belum terisi, yaitu Kasi Sosial Budaya yang purna tugas sejak November 2023 dan Kasubag Umum dan Kepegawaian yang purna

tugas sejak April 2024

B. Realisasi Program/Kegiatan/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 89.32%
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja tercapai 100%, dan penyerapan anggaran 98,92%
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,61%
      - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96,29%
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,44%
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,05%
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 100% dengan penyerapan anggaran 100%
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,75%
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 92,46%
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,40%
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,70%
      - Penyediaan Bahan Logistik kinerja tercapai 100% dan

penyerapan anggaran 87,61%

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,60%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 76,53%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,99%

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,07%

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,07%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,32%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 89,01%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,34%

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,92%

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96,30%
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,91%
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,89%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,30%
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,30%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,57%
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,57%
        - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,77%
        - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 95,91%
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,84%
    a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,84%
        - Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangn-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,84%
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,24%
        - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,84%
        - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,37%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,14%
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,14%
      - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%

C. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

D. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

<u>Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan:</u>

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, serta dukungan yang konsisten kepada aparatur guna mencapai tujuan organisasi
2. Sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang diterapkan terhadap pencapaian kinerja berfungsi sebagai stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kualitas kerja
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap pelayanan PATEN oleh Tim PATEN Kabupaten mendorong kecamatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan sarana serta prasarana sesuai standar
4. Dukungan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kecamatan, Polsek, Koramil, serta dinas/instansi terkait, juga memperkuat penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI
5. Kerja sama yang erat antara tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban, disertai koordinasi aktif dalam pemantauan dan pelaporan gangguan kamtibmas, turut memberikan kontribusi signifikan

6. Pembinaan dan pengawasan rutin oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan memastikan penyusunan APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku
7. Monitoring kinerja setiap triwulan oleh atasan memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala dan permasalahan yang muncul dalam pencapaian target kinerja, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan yang tepat

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya atau Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pengalaman pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat
2. Keterbatasan ketersediaan area parkir khusus bagi pengunjung pelayanan PATEN juga menjadi kendala, karena mengurangi tingkat kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan
3. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat waktu dan menyederhanakan prosedur pelayanan menyebabkan potensi efisiensi belum sepenuhnya terwujud.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng. Dari program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bareng sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng tahun 2024-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bareng pada umumnya,

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target/ melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Bareng.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan publik perlu menjadi prioritas, mencakup pengadaan atau penataan ulang area parkir khusus bagi pengguna layanan, penyediaan ruang tunggu yang representatif, serta fasilitas penunjang lain yang berorientasi pada kenyamanan Masyarakat
2. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan PATEN dari aspek durasi, alur pelayanan, dan persepsi masyarakat guna menghasilkan perbaikan yang berbasis data
3. Pembangunan sistem umpan balik masyarakat secara berkala juga menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi hambatan non-teknis yang memengaruhi kualitas layanan
4. Penyelarasan antara perencanaan kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan harus dioptimalkan agar alokasi anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak pelayanan yang terukur dan bermanfaat
5. peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan secara matang dan terpadu, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2025
6. Peningkatan fasilitas penunjang tupoksi yang disertai pendampingan teknis untuk meminimalkan kesalahan
7. Sinkronisasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bareng dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	16 orang/ bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	10 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	23 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	12 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	36 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	25 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	10 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	16 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	94,69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	5 dokumen	71,43
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	66,67
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/ bulan	N/A	16 orang/ bulan	15 orang/ bulan	93,75	16 orang/ bulan	31 orang/ bulan	64,58

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	66,67
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	66,67
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	24 paket	N/A	9 paket	9 paket	100	9 paket	18 paket	75,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	N/A	30 paket	30 paket	100	27 paket	48 paket	79,17
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	66,67
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	N/A	2 paket	2 paket	100	2 paket	4 paket	66,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	66,67
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	66,67
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	N/A	58 unit	58 unit	100	29 unit	87 unit	725,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng	100%	N/A	100%	100%	100	N/A	100%	100,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	57 paket	N/A	22 paket	20 paket	90,91	N/A	20 paket	35,09
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 laporan	N/A	36 laporan	36 laporan	100	36 laporan	72 laporan	66,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	N/A	25 laporan	25 laporan	100	25 laporan	31 laporan	66,67
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	N/A	10 unit	10 unit	100	10 unit	11 unit	66,67
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	N/A	2unit	2unit	100	2 unit	4 unit	66,67
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	N/A	13 unit	13 unit	100	7 unit	20 unit	41,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	15 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	66,67
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	12 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	66,67
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 orang	N/A	100 orang	100 orang	100	100 orang	200 orang	66,67
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	41.67
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	85,5	N/A	94,75	87,63	92,49	94,75	94,75	110,82

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	66,67
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	N/A	26 lembaga	26 lembaga	100	26 lembaga	26 lembaga	100,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	N/A	13 desa	13 desa	100	13 desa	13 desa	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	N/A	78 lembaga	78 lembaga	100	78 lembaga	78 lembaga	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	66,67
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	N/A	13 desa	13 desa	100	13 desa	13 desa	100,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	78 dokumen	N/A	26 dokumen	26 dokumen	100	26 dokumen	52 dokumen	66,67
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	36 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	66,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan proses pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kesesuaiannya dengan standar kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan dari kinerja pelayanan tersebut. Analisis ini juga mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi yang diemban

Kecamatan Bareng, sebagai perangkat daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di bidang administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, maupun pemberdayaan masyarakat secara luas.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Bareng berlandaskan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Pendelegasian ini dimaksudkan untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai perangkat daerah, sekaligus bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kinerja dan akuntabilitas kecamatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Bareng menyelenggarakan satu urusan, yaitu urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

   Hingga periode tribulan IV tahun 2024 Kecamatan Bareng menyusun 2 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2025, Perubahan Renja 2024. Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 dokumen yaitu dokumen LKJiP 2024, monitoring capaian kinerja dan realisasi anggaran tribulan 1,2,3 dan 4

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

   Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kecamatan, Kecamatan Bareng telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Musrenbang Desa di 13 desa, serta koordinasi dan patroli keamanan dan ketertiban wilayah. Kegiatan penyebarluasan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga

dilaksanakan secara rutin, meliputi penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan rapat pleno rutin PKK setiap bulan. Selain itu, dilakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan sosial lainnya. Di bidang pemerintahan desa, dilaksanakan pembinaan administrasi secara berkelanjutan. Adapun pada sektor pelayanan publik, diselenggarakan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang mencakup pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan surat pindah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan layanan lainnya

Kecamatan memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna memastikan pelaksanaan yang efektif di wilayah kerjanya. Dalam rangka memperluas dampak dan meningkatkan nilai tambah kegiatan, diperlukan penyelenggaraan program pemberdayaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di tingkat kecamatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan tersebut dapat berupa gelar potensi, pameran UMKM, atau bentuk serupa yang bertujuan mengembangkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, produk unggulan daerah, maupun inisiatif kreatif lainnya.

Gelar potensi ini juga berpotensi menjadi sarana pengembangan pariwisata terpadu Kecamatan Bareng, meliputi situs budaya Candi Arimbi, Air Terjun Grenjeng, dan Wisata Pandan Sili, yang dipadukan dengan pertunjukan kesenian tradisional seperti kuda lumping. Pengembangan pariwisata terpadu di wilayah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian lokal, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator lainnya yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan/atau hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini, Kecamatan Bareng menggunakan indikator yang merepresentasikan jenis pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
Renstra 2024 - 2026												
1	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
1.1	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	2 Dokumen	0 Dokumen	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5 Laporan	5 laporan	N/A	N/A	5 Laporan	2 Laporan	N/A	N/A	
1.2	**Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**42%**	**N/A**	**N/A**	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	16 Orang/Bulan	16 orang/bulan	N/A	N/A	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 Dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 Dokumen	3 Dokumen	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 Laporan	1 laporan	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	
1.3	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**91%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	22 Paket	38 paket	N/A	N/A	20 Paket	N/A	N/A	N/A	
1.4	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	9 Paket	8 paket	N/A	N/A	9 Paket	9 Paket	N/A	N/A	
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	30 Paket	24 paket	N/A	N/A	30 Paket	27 Paket	N/A	N/A	
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 paket	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	N/A	N/A	
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	2 Paket	2 paket	N/A	N/A	2 Paket	2 Paket	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	N/A	N/A	
1.4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4 Laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	
1.5	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**93%**	**N/A**	**N/A**	
1.5.1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	7 Unit	4 unit	N/A	N/A	58 Unit	27 Unit	N/A	N/A	
1.6	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	36 Laporan	36 laporan	N/A	N/A	36 Laporan	9 Laporan	N/A	N/A	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	25 Laporan	25 laporan	N/A	N/A	25 Laporan	6 Laporan	N/A	N/A	
1.7	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	10 Unit	10 unit	N/A	N/A	10 Unit	4 Unit	N/A	N/A	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	2 Unit	2 unit	N/A	N/A	2 Unit	0 Unit	N/A	N/A	
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	13 Unit	16 unit	N/A	N/A	13 Unit	0 Unit	N/A	N/A	
2	**Nilai Paten Kecamatan**	**-**	**-**	**94,75 Nilai**	**94,80 Nilai**	**N/A**	**N/A**	**87,63 Nilai**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2.1	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 Laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 Laporan	3 Laporan	N/A	N/A	
3	**Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**20%**	**N/A**	**N/A**	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
3.1	**Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**5 Laporan**	**5 laporan**	**N/A**	**N/A**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**N/A**	**N/A**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
3.2	**Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam**	**-**	**-**	**4 Dokumen**	**4 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**N/A**	**N/A**	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	100 Orang	100 orang	N/A	N/A	100 orang	-	N/A	N/A	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	4 Dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen	1 Dokumen	N/A	N/A	
4	**Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
4.1	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**25%**	**N/A**	**N/A**	
4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	12 Laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	3 Laporan	N/A	N/A	
5	**Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	
5.1	**Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap**	**-**	**-**	**13 Desa**	**13 desa**	**N/A**	**N/A**	**13 Desa**	**13 Desa**	**N/A**	**N/A**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
5.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	26 Dokumen	26 dokumen	N/A	N/A	26 Dokumen	13 Dokumen	N/A	N/A	
6	**Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif**	**-**	**-**	**100%**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**0%**	**N/A**	**N/A**	
6.1	**Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina**	**-**	**-**	**26 Lembaga**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**26 Lembaga**	**26 Lembaga**	**N/A**	**N/A**	
6.2	**Jumlah Desa yang menyusun RKPDes**	**-**	**-**	**13 Desa**	**13 desa**	**N/A**	**N/A**	**13 Desa**	**0 Desa**	**N/A**	**N/A**	
6.1.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	-	-	78 Lembaga Kemasyakat an	78 lembaga kemasyaka tan	N/A	N/A	78 Lembaga Kemasyakat an	0 Lembaga Kemasyakata n	N/A	N/A	
6.2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	4 Laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 Laporan	2 Laporan	N/A	N/A	
Renstra 2025 - 2029												
1	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**			**N/A**	**N/A**	**74,50**	**74,75**	**N/A**	**N/A**	**74,50**	**74,75**	
1.1	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			**N/A**	**N/A**	**2 dokumen**	**3 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**2 dokumen**	**3 dokumen**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			**N/A**	**N/A**	**5 laporan**	**5 laporan**	**N/A**	**N/A**	**5 laporan**	**5 laporan**	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			**N/A**	**N/A**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	
1.1.3	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			N/A	N/A	10 dokumen	10 dokumen	N/A	N/A	10 dokumen	10 dokumen	
1.2	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**			**N/A**	**N/A**	**16 orang/bulan**	**16 orang/bulan**	**N/A**	**N/A**	**16 orang/bulan**	**16 orang/bulan**	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			**N/A**	**N/A**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			**N/A**	**N/A**	**1 laporan**	**1 laporan**	**N/A**	**N/A**	**1 laporan**	**1 laporan**	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	
1.3	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**			**N/A**	**N/A**	**16 Paket**	**16 Paket**	**N/A**	**N/A**	**16 Paket**	**16 Paket**	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			N/A	N/A	16 Paket	16 Paket	N/A	N/A	16 Paket	16 Paket	
1.4	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**			**N/A**	**N/A**	**9 Paket**	**9 Paket**	**N/A**	**N/A**	**9 Paket**	**9 Paket**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**27 Paket**	**27 Paket**	**N/A**	**N/A**	**27 Paket**	**27 Paket**	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**1 paket**	**1 paket**	**N/A**	**N/A**	**1 paket**	**1 paket**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**2 paket**	**2 paket**	**N/A**	**N/A**	**2 paket**	**2 paket**	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			**N/A**	**N/A**	**4 laporan**	**4 laporan**	**N/A**	**N/A**	**4 laporan**	**4 laporan**	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	9 Paket	9 Paket	N/A	N/A	9 Paket	9 Paket	
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	27 Paket	27 Paket	N/A	N/A	27 Paket	27 Paket	
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	1 paket	1 paket	N/A	N/A	1 paket	1 paket	
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			N/A	N/A	2 paket	2 paket	N/A	N/A	2 paket	2 paket	
1.4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
1.5	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**			**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1 Unit**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1 Unit**	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**6 Unit**	**6 Unit**	**N/A**	**N/A**	**6 Unit**	**6 Unit**	
1.5.1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	1 Unit	N/A	N/A	N/A	1 Unit	
1.5.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			N/A	N/A	6 Unit	6 Unit	N/A	N/A	6 Unit	6 Unit	
1.6	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**			**N/A**	**N/A**	**36 laporan**	**36 laporan**	**N/A**	**N/A**	**36 laporan**	**36 laporan**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			**N/A**	**N/A**	**25 laporan**	**25 laporan**	**N/A**	**N/A**	**25 laporan**	**25 laporan**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	
1.7	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**			**N/A**	**N/A**	**10 unit**	**10 unit**	**N/A**	**N/A**	**10 unit**	**10 unit**	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			**N/A**	**N/A**	**2 unit**	**2 unit**	**N/A**	**N/A**	**2 unit**	**2 unit**	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			**N/A**	**N/A**	**13 unit**	**13 unit**	**N/A**	**N/A**	**13 unit**	**13 unit**	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			N/A	N/A	10 unit	10 unit	N/A	N/A	10 unit	10 unit	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	2 unit	2 unit	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	N/A	13 unit	13 unit	N/A	N/A	13 unit	13 unit	
2	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			**N/A**	**N/A**	**76,50%**	**77,00%**	**N/A**	**N/A**	**76,50%**	**77,00%**	
2.1	**Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**			**N/A**	**N/A**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**N/A**	**N/A**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			**N/A**	**N/A**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**N/A**	**N/A**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	
2.1.1	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	
2.2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	
3	**Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	
3.1	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa**			**N/A**	**N/A**	**78 Lembaga**	**78 Lembaga**	**N/A**	**N/A**	**78 Lembaga**	**78 Lembaga**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			**N/A**	**N/A**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**N/A**	**N/A**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	
3.1.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa			N/A	N/A	78 Lembaga	78 Lembaga	N/A	N/A	78 Lembaga	78 Lembaga	
3.2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	
4	**Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**N/A**	**N/A**	**49,50%**	**50,00%**	**N/A**	**N/A**	**49,50%**	**50,00%**	
4.1	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**			**N/A**	**N/A**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**N/A**	**N/A**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	
5	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	
5.1	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**			**N/A**	**N/A**	**100 Orang**	**100 Orang**	**N/A**	**N/A**	**100 Orang**	**100 Orang**	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			**N/A**	**N/A**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**N/A**	**N/A**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	
5.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			N/A	N/A	100 Orang	100 Orang	N/A	N/A	100 Orang	100 Orang	
5.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	
6	**Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	**N/A**	**N/A**	**75,50%**	**76,00%**	
6.1	**Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**			N/A	N/A	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**N/A**	**N/A**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	14
6.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

   Pada aspek pelayanan yang bersifat krusial, Kecamatan Bareng memfokuskan upaya pada peningkatan profesionalisme aparatur dan optimalisasi sistem pelayanan. Langkah ini ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Isu – isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bareng dapat dikategorikan dalam uraian – uraian berikut ini :

   a. Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

      Sumber Daya Manusia (SDM) pada level kecamatan dan desa/kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, kualitas SDM saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial, ketimpangan pemahaman terhadap regulasi dan pemanfaatan sistem digital pemerintahan, serta rendahnya akses terhadap program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Kondisi ini berimplikasi pada potensi terhambatnya efektivitas pelayanan dan melemahnya akuntabilitas kinerja aparatur. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan penerapan sistem merit perlu diposisikan sebagai isu strategis dan menjadi prioritas utama dalam agenda perencanaan pembangunan daerah

   b. Sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan faktor pendukung utama dalam menciptakan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas bagi Masyarakat.

      Hasil observasi lapangan mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan belum mencapai standar optimal. Keterbatasan tersebut mencakup aspek ketersediaan ruang layanan, kelengkapan peralatan pendukung, infrastruktur digital, serta aksesibilitas yang

ramah bagi kelompok rentan. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kenyamanan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan alokasi anggaran serta belum terintegrasinya perencanaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh. Untuk itu, penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik harus menjadi fokus strategis dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas layanan dan tingkat kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Belum Optimalnya Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga, dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Desa.

   Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), BUMDesa Bersama (BUMDesma), serta lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki potensi signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasi peran strategis tersebut belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kapasitas sumber daya pengelola, kelembagaan yang belum kokoh, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan sektor swasta. Program pemberdayaan masyarakat juga cenderung belum berkelanjutan dan kurang berbasis potensi lokal, sehingga kontribusi BUMDesa, BUMDesma, dan lembaga desa terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan program pemberdayaan yang berorientasi pada potensi unggulan desa perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah

d. Penguatan Wawasan Kebangsaan

   Wawasan kebangsaan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, toleran, dan memiliki semangat persatuan dalam keberagaman. Di tengah derasnya arus informasi, dinamika globalisasi, serta meningkatnya potensi konflik sosial dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan, upaya penguatan wawasan kebangsaan menjadi semakin relevan dan mendesak. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, menurunnya semangat gotong royong, dan munculnya sikap intoleransi, khususnya di kalangan

generasi muda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan edukatif dan partisipatif yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sinergi lintas sektor, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai agen perubahan. Isu strategis ini perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah untuk menjaga ketahanan sosial, memperkuat identitas nasional, dan mendorong kohesi sosial di tingkat desa/kelurahan

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
   a. Rendahnya kualitas SDM mengakibatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat, lemahnya implementasi program pembangunan, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dan inovasi di tingkat lokal.
   b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik menyebabkan penurunan kualitas layanan kepada masyarakat, meningkatnya ketidakpuasan warga, serta potensi ketimpangan akses layanan antarwilayah. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun dapat menurun.
   c. Kurangnya peran aktif lembaga desa dan unit usaha desa berdampak pada stagnasi ekonomi lokal, rendahnya penciptaan lapangan kerja, serta belum berkembangnya potensi unggulan desa. Ketergantungan terhadap bantuan eksternal meningkat dan kemandirian desa sulit tercapai.
   d. Minimnya penguatan wawasan kebangsaan dapat memicu lunturnya nilai-nilai persatuan, meningkatnya sikap intoleransi, serta menurunnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial serta melemahkan ketahanan nasional di tingkat lokal.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

   Tantangan :

   a. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang berdampak pada kelancaran proses pelayanan kepada Masyarakat

b. Kapasitas jaringan internet yang belum optimal, di mana kondisi *crowded* pada jam tertentu menyebabkan keterlambatan proses pelayanan.
c. Jumlah personel pelayanan yang terbatas, sehingga beban kerja per petugas menjadi tinggi.
d. Kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam hal kompetensi teknis dan manajerial terkait peningkatan pelayanan publik.
e. Kendala teknis peralatan perekaman e-KTP, di mana alat perekaman sidik jari dan iris mata sering mengalami *trouble*, sehingga pemohon diarahkan untuk melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
f. Beban kerja tinggi pada pelayanan administrasi kependudukan, di mana jumlah pemohon KK dan e-KTP cukup banyak, sementara operator hanya berjumlah satu orang dan perangkat scanner yang dapat digunakan hanya satu unit, sehingga pelayanan belum maksimal.

Peluang :

a. Optimalisasi kinerja petugas pelayanan yang ada
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal melalui pemeliharaan berkala
c. Partisipasi petugas dalam pelatihan teknis bagi operator pelayanan publik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan, baik dalam pengoperasian peralatan maupun dalam memberikan pelayanan yang santun dan menyenangkan kepada Masyarakat
d. Peningkatan kualitas pelayanan juga dapat diwujudkan melalui pengadaan dan perbaikan sarana prasarana, termasuk penyediaan fasilitas ruang tunggu yang lebih nyaman bagi pemohon, dengan memanfaatkan anggaran operasional kecamatan secara efektif
e. Penguatan kapasitas dan motivasi kerja pegawai perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan serta bimbingan teknis, sehingga mampu merespons tuntutan eksternal yang mengharuskan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Langkah ini juga perlu diiringi dengan optimalisasi dukungan dari atasan, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, serta pengawasan melekat untuk menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Bareng terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   a. Perencanaan Pembangunan
      - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
      - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis.
      - Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
   b. Keamanan dan Ketertiban

      Setiap tahun OPD Kecamatan Bareng dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Bareng dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
   c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

      Dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bareng di tuntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal yang bisa kita lihat dalam indeks kepuasan masyarakat yang selalu meningkat setiap tahun dan untuk mempertahankan dan memperbaiki indeks kepuasan masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang up to date.
   d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

      Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan kepada Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih

e. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Diperlukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur desa untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang kompeten dan tertib administrasi sehingga untuk pemenuhan dokumen dokumen seperti penyusunan RKPDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dapat tepat waktu

f. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih kurangnya kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat di ikuti oleh pegawai

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Bareng sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2026 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodesasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2026..

Dalam proses penyempurnaan program dan kegiatan, Kecamatan Bareng melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan aktual serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif, dan kapabel. Aparatur tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara optimal dalam kerangka penguatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Kecamatan Bareng memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung, menuntut adanya sinergi lintas perangkat daerah (*SKPD*), mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapkan pada besarnya kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana dan berperspektif komprehensif

untuk mendorong pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bareng.

Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Jombang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Bareng**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**74,50**	**2.767.784.571**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Bareng**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**74,50**	**2.686.744.175**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 dokumen**	**5.185.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 dokumen**	**2.885.000**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 laporan**		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.660.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.710.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	175.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**16 orang/ bulan**	**2.403.265.539**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**16 orang/ bulan**	**2.439.217.840**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**12 dokumen**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**12 dokumen**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1 Laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1 Laporan**		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2.328.502.539	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2.369.592.840	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	74.238.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	69.450.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	175.000	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**16 Paket**	**9.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**N/A**	**0**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	9.600.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	0	
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi**	**9 paket**	**142.225.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi**	**9 paket**	**92.652.610**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**27 paket**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**27 paket**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1 paket**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1 paket**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**2 paket**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**2 paket**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**1 dokumen**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**1 dokumen**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**4 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**4 laporan**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	9 paket	3.969.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	9 paket	3.871.300	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	15.226.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	12.572.750	
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	87.362.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	43.560.000	
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.460.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.283.060	
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.160.000	
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	29.856.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	26.205.500	
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**N.A**	**44.478.432**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**N.A**	**13.320.000**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan**	**6 Unit**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan**	**1 Unit**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
			Lainnya yang Disediakan					**Lainnya yang Disediakan**			
1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N.A	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	44.478.432	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.320.000	
1.6	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**36 laporan**	**102.292.000**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**36 laporan**	**79.828.000**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**25 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**25 laporan**		
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	49.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	35.100.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	53.092.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	44.728.000	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**10 unit**	**60.738.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**10 unit**	**58.840.725**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
		Kec. Bareng	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2 unit**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2 unit**		
		Kec. Bareng	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**7 unit**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**7 unit**		
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	43.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	43.800.000	
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12.268.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.370.725	
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4.670.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4.670.000	
2	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**76,50%**	**4.470.000**	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**76,50%**	**20.835.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**	**4 Laporan**	**4.470.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**	**4 Laporan**	**20.835.000**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**12 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**12 Laporan**		
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.800.000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4.470.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.035.000	
3	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**75,50%**	**144.947.000**	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**75,50%**	**37.342.500**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan**	**78 lembaga**	**144.947.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan**	**78 lembaga**	**37.342.500**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**4 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**4 laporan**		
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	15.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	15.380.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	129.797.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	21.962.500	
4	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**49,50%**	**19.800.000**	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**49,50%**	**20.840.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
4.1	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**	**12 laporan**	**19.800.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**	**12 laporan**	**20.840.000**	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	19.800.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	20.840.000	
5	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**75,50%**	**177.103.369**	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**75,50%**	**136.531.986**	
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**	**100 orang**	**177.103.369**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**	**100 orang**	**136.531.986**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**4 laporan**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**4 laporan**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**10**	**9**	**11**	**12**
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	123.363.369	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	81.706.986	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	53.740.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	54.825.000	
6	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75,50%**	**16.050.000**	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Bareng**	**Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**13.475.000**	
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**13 desa**	**16.050.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**13 desa**	**13.475.000**	
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	16.050.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	13.475.000	
TOTAL					**3.130.154.940**	**TOTAL**				**2.915.768.660**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bareng, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perencanaan, khususnya pada proses penyusunan rencana kerja. Stakeholder yang terlibat antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, serta perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja bertujuan untuk menyerap aspirasi dan informasi terkait kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi program dan kegiatan yang relevan untuk diakomodir sesuai kapasitas dan kewenangan kecamatan. Rancangan rencana kerja dibahas dalam Forum SKPD tingkat Kecamatan untuk menyelaraskan rumusan *Renja* dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan. Usulan yang disampaikan dalam forum bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Selanjutnya, usulan masyarakat diselaraskan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bareng, dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan tersebut, beberapa kegiatan prioritas telah dirumuskan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026, yang berkaitan dengan:

a. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif** akan diwujudkan melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dokumen Renstra yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah
b. **Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan** akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam implementasi program di seluruh desa. Koordinasi ini mencakup sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga intervensi yang

dilakukan dapat lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, serta memperkuat efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

c. **Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir** akan dipastikan melalui optimalisasi peran perangkat desa yang responsif dan adaptif sebagai petugas pengumpulan data (*collecting data*). Proses ini dilakukan secara berkesinambungan guna menyediakan basis data yang akurat, relevan, dan terbarukan, yang menjadi bahan utama dalam penyusunan sinergitas program kecamatan. Validitas dan keterkinian data akan dijaga melalui mekanisme verifikasi, pembaruan berkala, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti.

d. Pemerataan pembangunan fisik diarahkan untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antarwilayah, sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya lokal melalui pelaksanaan kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat telah sejalan dengan prioritas kebutuhan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Bareng. Kondisi sinergis ini memungkinkan integrasi yang lancar ke dalam dokumen perencanaan kecamatan, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil pemilahan dan pembahasan dalam Forum SKPD, serta dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

No.	Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Alasan/Keterangan
1	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Menambah anggaran untuk pengadaan mesin penghancur kertas	Kecamatan Bareng	1 Unit	APBD Kab	Untuk memusnahkan dokumen pengajuan pelayanan kependudukan yang sudah tidak digunakan, agar tidak terjadi penyalahgunaan
		Menambah anggaran untuk pengadaan lemari es	Kecamatan Bareng	1 Unit	APBD Kab	Digunakan di ruang paten, disediakan untuk pengguna layanan
		Menambah anggaran untuk pengadaan AC split	Kecamatan Bareng	2 Unit	APBD Kab	Digunakan di ruang pelayanan paten dan ruang laktasi
		Menambah anggaran pengadaan televisi	Kecamatan Bareng	1 Unit	APBD Kab	Digunakan di ruang paten, untuk mengganti televisi yang rusak di ruang paten
		Menambah anggaran pengadaan laptop	Kecamatan Bareng	1 Unit	APBD Kab	Digunakan untuk sarana prasarana kantor

2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Menambah Anggaran Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bareng	12 Bulan	APBD Kab	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
		Menambah Anggaran Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kecamatan Bareng	12 Bulan	APBD Kab	Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, Dokumen Perencanaan disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Selanjutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dioperasionalkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2026, yang kemudian akan diimplementasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2026 pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan secara menyeluruh, terpadu, dan terukur. Dalam penyusunannya, Renja Kecamatan Bareng juga harus mengacu dan memperhatikan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sehingga tercipta sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas tingkat pemerintahan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2026 bertema, “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang dijabarkan ke dalam 8 prioritas pembangunan nasional (PN):

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangkan insutri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberatasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Rencana Kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Oleh karena itu, tema/arah pembangunan daerah Tahun 2025 adalah **"Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis"**, yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kemandirian Desa serta Kehidupan Masyarakat yang harmonis
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Peningkatan Akses Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, ditetapkan tema/arah pembangunan daerah pada Tahun 2026 yaitu *"Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis"*. Tema tersebut selaras dengan empat prioritas pembangunan daerah yang menjadi acuan perencanaan seluruh perangkat daerah.

Guna mendukung arah pembangunan tersebut, setiap perangkat daerah menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing, serta indikator kinerja yang relevan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk Tahun 2026, tujuan yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi, serta profil pelayanan yang terkait.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bareng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75,20
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,22
		2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74,90

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya, program dan kegiatan merupakan instrumen operasional yang dirancang untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan keterpaduan antar sektor, keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian Tujuan Daerah

  Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Bareng difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Jombang, yakni *"Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua"*. Sasaran yang ditetapkan dalam RJMPD adalah *"Meningkatnya*

Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi", yang secara strategis selaras dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu *"Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif"*.

- Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

  Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan dan 169 target terukur dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. SDGs menjadi agenda pembangunan global yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kelestarian planet bumi. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, pemerintah daerah di seluruh Indonesia berkewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian target-target SDGs. Dalam konteks tersebut, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng diarahkan dan diimplementasikan untuk mendukung pencapaian target-target SDGs di lingkup wilayah kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

  Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bareng akan memperkuat peran koordinatif dan fasilitatif dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi pendataan masyarakat miskin secara terpadu berbasis data yang valid dan terbarui, penyusunan program pemberdayaan ekonomi produktif, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, akan didorong penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial untuk menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memperluas akses layanan dasar yang adil dan merata. Dengan demikian, target pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

- Pencapaian SPM

  Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, Kecamatan Bareng akan melakukan penataan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah, dan memperjelas alur layanan publik. Pemanfaatan sistem pelayanan digital diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif, meminimalisir potensi penyimpangan, serta memberikan transparansi kepada masyarakat terkait waktu, biaya, dan prosedur pelayanan.

  Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial akan menjadi prioritas, agar setiap petugas memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kerja yang memadai, seperti perangkat komputer, jaringan internet, ruang layanan yang nyaman, dan fasilitas penunjang lainnya, akan terus diupayakan untuk menunjang kelancaran operasional.

  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur yang telah distandarisasi benar-benar dijalankan, serta memberikan ruang perbaikan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Kecamatan Bareng dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

- Pengarustamaan Responsive Gender

  Integrasi PPRG tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat berdasarkan perbedaan pengalaman, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan anggaran yang disusun akan lebih inklusif, efektif, dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

  Pelaksanaan PPRG memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur dalam analisis gender, penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan

indikator responsif gender. Di tingkat kecamatan, upaya ini diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lokal, sehingga pengarusutamaan gender tidak hanya berhenti di tataran perencanaan, tetapi terimplementasi secara nyata di lapangan.

Kegiatan Forum OPD Penyusunan Renja 2026 yang telah melibatkan tokoh perempuan dan PKK menjadi langkah awal yang strategis. Namun, keberlanjutan upaya tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program prioritas, serta pengawalan implementasi kegiatan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan gender akan terintegrasi secara menyeluruh dalam siklus pembangunan daerah, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Bareng memiliki karakteristik geografis yang beragam, mencakup wilayah dataran yang rawan banjir dengan dukungan sistem irigasi teknis, kawasan hutan dan konservasi, lahan pertanian dan hortikultura, serta potensi energi dan pertambangan. Di samping itu, kawasan permukiman dan industri di wilayah ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kecamatan Bareng juga termasuk dalam kawasan agropolitan yang berperan mendukung sistem produksi pertanian, sekaligus menjadi bagian dari wilayah konservasi dan pengembangan infrastruktur sumber daya air melalui keberadaan Embung Karangan dan Embung Bareng. Potensi pengembangan sektor pariwisata juga cukup besar, khususnya pada daya tarik wisata alam dan budaya seperti Candi Arimbi dan Air Terjun Grenggeng. Secara fungsional, Kecamatan Bareng turut berperan sebagai bagian dari kawasan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang strategis bagi ketahanan pangan daerah.

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

- **Jumlah Program dan Kegiatan**

  Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2026 mencakup 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
b. Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**

  Dari 6 (empat) program dan 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 untuk dilaksanakan di Kecamatan Bareng sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bareng dan melingkupi semua Desa (13 Desa).

- **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

  Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2026 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.915.768.660

c. **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Program dan kegiatan yang mengalami perbedaan dengan rancangan awal RKPD, baik dari sisi jenis program/kegiatan, pagu, indikator kinerja, maupun kombinasi di antaranya, tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA dan DPA yang telah disahkan. Sementara itu, program dan kegiatan yang belum mendapatkan persetujuan atau belum terealisasi akan diajukan kembali melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau direncanakan untuk diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

d. **Tabel Rencana Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BARENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan				2.915.768.660,00	Dana Alokasi Umum			9.131.208.440,00
7,01	Kecamatan				2.915.768.660,00	Dana Alokasi Umum			9.131.208.440,00
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	74,50	2.686.744.174,50	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	74,55	8.758.184.571,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	2 dokumen	2.885.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	2 dokumen	5.185.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bareng	5 dokumen				5 dokumen	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	N/A				10 Laporan	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	2 dokumen	2.710.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 dokumen	4.082.500,00
7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bareng	5 dokumen	175.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	5 dokumen	525.000,00
7.01.01.2.01.0009	3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	10 Laporan	577.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bareng	16 orang/ bulan	2.439.217.840,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	16 orang/ bulan	2.403.265.539,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bareng	12 dokumen				12 dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bareng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bareng	16 orang/ bulan	2.369.592.840,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 orang/ bulan	2.328.502.539,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bareng	12 dokumen	69.450.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 dokumen	74.238.000,00
7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bareng	1 Laporan	175.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 Laporan	525.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	16 Paket	-
7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 Paket	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	9 paket	92.652.609,50	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	9 paket	142.225.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	27 paket				27 paket	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 paket				1 paket	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	2 paket				2 paket	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bareng	4 laporan				4 laporan	
7.01.01.2.06.0001	1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	9 paket	3.871.300,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	9 paket	3.969.350,00
7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	27 paket	12.572.750,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	27 paket	15.226.250,00
7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 paket	43.560.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 paket	87.362.000,00
7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	2 paket	4.283.059,50	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 paket	3.460.000,00
7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 dokumen	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	2.352.000,00
7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bareng	4 laporan	26.205.500,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	29.856.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	N/A	13.320.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	1 Unit	6.044.478.432,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 Unit				1 Unit	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	1 Unit	6.000.000.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 Unit	13.320.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	6 Unit	44.478.432,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bareng	36 laporan	79.828.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	36 laporan	102.292.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	25 laporan				25 laporan	
7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bareng	36 laporan	35.100.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	36 laporan	49.200.000,00
7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	25 laporan	44.728.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	25 laporan	53.092.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bareng	10 unit	58.840.725,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	10 unit	60.738.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	2 unit				2 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	13 unit				13 unit	
7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bareng	10 unit	43.800.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	10 unit	43.800.000,00
7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	2 unit	10.370.725,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 unit	12.268.000,00
7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	7 unit	4.670.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	7 unit	4.670.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bareng	76,50%	20.835.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	77,00%	15.123.500,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	20.835.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	4 laporan	15.123.500,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	14.800.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	10.653.500,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	12 laporan	6.035.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	4.470.000,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bareng	76,50%	37.342.500,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	77,00%	144.947.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Bareng	78 lembaga	37.342.500,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	78 lembaga	144.947.000,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Bareng	78 lembaga	15.380.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	78 lembaga	15.150.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	21.962.500,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	129.797.000,00
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bareng	49,50%	20.840.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	50,00%	19.800.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kecamatan Bareng	12 laporan	20.840.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	12 laporan	19.800.000,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kecamatan Bareng	12 laporan	20.840.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	19.800.000,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bareng	75,50%	136.531.985,50	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	76,00%	177.103.369,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bareng	100 orang	136.531.985,50	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100 orang	177.103.369,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan				4 laporan	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bareng	100 orang	81.706.985,50	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	100 orang	123.363.369,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	54.825.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	53.740.000,00
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bareng	75,50%	13.475.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	76,00%	16.050.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Kecamatan Bareng	13 desa	13.475.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	13 desa	16.050.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bareng	26 dokumen	13.475.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	26 dokumen	16.050.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Dokumen ini memuat program, kegiatan, serta pagu indikatif yang telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan dalam RKPD Tahun 2026, yang selaras dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Agar pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 berjalan efektif dan efisien, diperlukan keterpaduan dan sinergi antar-satuan kerja, baik di tingkat internal Kecamatan, lintas perangkat daerah, antar-kecamatan, maupun dengan partisipasi aktif masyarakat. Sinkronisasi dan koordinasi program dilakukan melalui pemanfaatan forum perencanaan, rapat koordinasi, serta mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga tercapai pelaksanaan yang terpadu dan selaras.

Prinsip *safe guarding* — yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta monitoring dan evaluasi — menjadi landasan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan penerapan prinsip ini sangat bergantung pada peran serta aktif masyarakat, baik dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan, maupun dalam pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi faktor strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2026 didasarkan pada penyusunan RKPD Tahun 2026, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Pada tahun 2026, terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kemandirian Desa serta Kehidupan Masyarakat yang harmonis
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Peningkatan Akses Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup

Tema atau arah pembangunan daerah tahun 2026 yang harus diwujudkan adalah " Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis"**.** Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bareng. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bareng dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun ke depan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bareng memiliki mandat untuk merealisasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Implementasi

tersebut dilaksanakan secara terarah, terukur, dan akuntabel, dengan menjamin keterpaduan dan konsistensi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan

b. Kecamatan Bareng berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 secara konsisten dan akuntabel dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

c. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2026, Kecamatan Bareng berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara sistematis terhadap program dan kegiatan Tahun 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan efisiensi penggunaan anggaran.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah. Keberhasilan implementasi Renja memerlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai, serta kapasitas aparatur yang kompeten, memiliki semangat, tekad, dan kedisiplinan tinggi dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai pagu anggaran yang tersedia.

Selain berperan sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Bareng juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback) yang berguna bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan, penyempurnaan strategi, dan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya. Melalui mekanisme evaluasi berkala, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

program, sehingga kinerja kecamatan dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan bersama dalam mengarahkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bareng, agar tetap selaras dengan tema dan arah pembangunan Kabupaten Jombang. Untuk itu, koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah teknis maupun pemerintah desa, perlu semakin diperkuat. Sinergitas ini akan memantapkan pencapaian target pembangunan yang telah diraih serta memastikan terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bareng Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang.

Jombang, 11 Agustus 2025
CAMAT BARENG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN BARENG

USMAN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19710806 199803 1 007